

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sebuah Negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, serta gender.

Menurut Soedijarto (2008 : 295) Wajib Belajar merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah mengikuti pendidikan sekolah sampai jenjang tertentu, dan pemerintah berupaya memberikan dukungan sepenuhnya, agar warga negara peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan sekolah. Program Wajib Belajar pendidikan 9 tahun merupakan perwujudan pendidikan dasar untuk semua anak usia 6-15 tahun. Pelaksanaan Wajib Belajar selain menjadi hak dan kewajiban orang tua, juga menjadi hak dan kewajiban masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaannya. Dan tak kalah pentingnya pelaksanaan Wajib Belajar menjadi hak dan kewajiban pemerintah. Demikian juga peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan biaya

pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Secara hakiki Wajib Belajar telah menjadi tekad pemerintah. Tekad ini hendaknya tidak hanya dalam bentuk slogan, wacana dan sebatas konsep, tetapi harus diimplementasikan dengan konkret, terutama yang menyangkut penyediaan dana. Tanpa dana mana mungkin tujuan penuntasan wajib belajar dapat terwujud<sup>1</sup>

Pendidikan yang diupayakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilihat dari Program Wajib Belajar. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengalokasikan APBN 20% untuk pendidikan. Program Wajib Belajar pendidikan 9 Tahun dan beberapa Undang-Undang yang mengamanatkan pentingnya pendidikan bagi anak, masih belum optimal jika melihat realita yang terjadi di Kecamatan Paguat sebagian anak-anak yang putus sekolah.

Realitasnya masih ada sebagian besar anak yang tidak memperhatikan pendidikannya bagi anak. Menurut laporan tahun 2012 di Indonesia masih terdapat sekitar 2,3 juta anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah (Unicef, 2012:9). Putus sekolah menjadi masalah yang cukup serius karena ironis dengan usaha pemerintah yang genjar untuk memajukan pendidikan nasional.

Pentingnya pendidikan dimiliki oleh individu berbagai program yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal mulai dari pendidikan wajib sembilan tahun, pendidikan wajib dua belas tahun sampai pada pendidikan wajib

---

<sup>1</sup> Angger Angelino Montolal. "Peranan Pemerintah dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar di Kecamatan Matuari Kota Bitung". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.

sampai dijenjang perguruan tinggi, akan tetapi berbagai program tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan apa yang diharapkan, dan ini yang terjadi di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan observasi awal saya masih ada anak putus sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA yang disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga yang sebagian besar pekerjaan orang tuanya sebagai petani, penambang dan selain itu lingkungan sosial menjadi pemicu seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Putus sekolah merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh Negara berkembang atau Negara miskin. Semakin tinggi angka anak putus sekolah mengindikasikan semakin rendahnya mutu atau kualitas pendidikan di Negara yang bersangkutan, sebaliknya semakin rendah angka anak putus sekolah menunjukkan tingginya kualitas pendidikan disuatu Negara. Dalam hal ini dimaksudkan adalah bahwa pendidikan sangat berpengaruh dalam pembangunan dalam suatu Negara.

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Undang-undang nomor 5 tahun 1979, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang orangtuanya karena suatu sebab, tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak terlantar. Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya kejenjang pendidikan berikutnya (Ary H. Gunawan 2010).

Anak yang tidak melanjutkan pendidikan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979, keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Dalam hubungan dengan belajar, keluarga mempunyai peran penting. Keadaan keluarga akan sangat menentukan keberhasilan seorang anak dalam proses belajarnya. Oleh sebab itu faktor keluarga yang mempengaruhi anak putus sekolah yaitu Kondisi sosial orang tua yang menyebabkan anak putus sekolah meliputi tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Latar pendidikan orang tua seperti observasi pra peneliti yang dilakukan oleh peneliti sebagian besar orang tua dari anak yang mengalami putus sekolah disebabkan karena latar pendidikan yang rendah. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kurangnya bimbingan yang orang tua kepada anaknya, sehingga akan berpengaruh pada kualitas anak itu sendiri.

Seseorang siswa dikatakan putus sekolah apabila ia tidak dapat menyelesaikan program suatu secara utuh yang berlaku sebagai suatu sistem. Bagi anak SD, seseorang dikatakan putus sekolah apabila tidak menyelesaikan programnya sampai enam tahun, bagi siswa SLTP jika dikatakan putus sekolah apabila tidak dapat menyelesaikan programnya sampai dengan kelas tiga, begitu juga dengan jenjang berikutnya (Suyanto, 2002:197). Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan. Faktor ekonomi menjadi alasan penting terjadinya putus sekolah. Persoalan ini telah berakar dan sulit untuk

di pecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Ketika membicarakan peningkatan ekonomi keluarga terkait bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Sementara semua solusi yang diinginkan tidak akan lepas dari kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh, sehingga kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengatasi segala permasalahan termasuk perbaikan kondisi masyarakat (Gunawan A. H, 2000: 27).<sup>2</sup>

Beberapa faktor penyebab anak putus sekolah yakni kondisi sosial ekonomi keluarga salah satu penyebab anak putus sekolah di karena kan biaya, di sebabkan oleh ketidak mampuan orang tua responden untuk membiyai sekolah anak-anaknya. Dan jika kita lihat bahwa faktor ekonomi sangat identik dengan kemiskinan. Ketidakmampuan secara ekonomis meletakan mereka pada garis kemiskinan kebutuhan pokok dalam pencapaian saja masih kurang apalagi dana untuk pendidikan walau pemerintah memberikan program bantuan itu tidak bisa jadi penguat bagi terlaksananya pendidikan secara keseluruhan pada anak didik karena sebagian dari mereka adalah dari kalangan yang ekonomi dibawah yang bahkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi apalagi kebutuhan dalam pendidikan seperti halnya membeli kebutuhan sekolah buku, pena, tas sekolah, sepatu bahkan memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya yang semua itu membutuhkan dana yang diluar dari tanggungan pamarintah. Bukan hanya keadaan ekonomi bahkan dari tempat tinggal masyarakat yang anaknya putus sekolah sangat memprihatinkan karena mereka keluarga anak yang putus sekolah

---

<sup>2</sup> Desca Thea Purnama. 2015. Fenomena Anak Putus Sekolah dan Faktor Penyebabnya di Kota Pontianak. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial*. Vol. 2 Nomor 4. Hal. 4.

rumahnya semipermanen serta ukuran yang hanya cukup untuk ditempati oleh anggota keluarganya saja dan luas bangunan yang tidak cukup besar. Tempat tinggal adalah bentuk nyata dari keadaan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Soginti ditambah lagi keadaan pekerjaan masyarakat Soginti yang hanya bergantung pada hasil alam yang menurut data Desa Soginti mayoritas pekerjaan masyarakat sebagai petani sebanyak tiga puluh orang, buruh tani sembilan orang dan yang belum bekerja sebanyak dua puluh orang<sup>3</sup>. Hal ini memberikan gambaran bahwa keadaan ekonomi masyarakat Soginti belum memenuhi standar sejahtera karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan sekalipun ada pekerjaan hanya sebagai petani.

Keberadaan anak putus sekolah yang ada di Desa Soginti memberikan gambaran bahwa anak-anak yang seharusnya belajar justru menjadi penambang dengan tujuan membantu ekonomi keluarga. Sangat ironis memang anak yang seharusnya belajar karna desakan ekonomi menjadikan mereka justru putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja dan ada pula yang hanya menghabiskan waktu mereka dengan bermain .dalam hal ini hanya sebagai pengangguran.

Keberadaan anak putus sekolah yang ada di Desa Soginti tercatat ada sepuluh<sup>4</sup> anak yang tidak melanjutkan pendidikan yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarga bahkan ada yang dipengaruhi oleh masalah orang tuanya yang sudah cerai yang mengakibatkan anak putus sekolah hal ini akan berdampak pada keadaan sosial keluarga anak putus sekolah.

---

<sup>3</sup> Profil Desa Soginti Tahun 2017.

<sup>4</sup> Data Desa Soginti tentang Anak Putus Sekolah Tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk menelitian mengenai “**Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Anak Putus Sekolah di Desa soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato (Studi Kasus Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato)**”.

Dipilihnya Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato sebagai tempat Penelitian mengingat lokasi tersebut masih terdapat anak-anak yang mengalami putus sekolah.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat di rumuskan suatu rumusan permasalahan adalah Bagaimanakah kondisi sosial ekonomi keluarga anak putus sekolah bagi masyarakat di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga anak putus sekolah bagi masyarakat di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

## **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah:

### **1. Bagi Penulis**

- a. Sebagai bahan analisis penulis mengenai kehidupan sosial ekonomi keluarga anak putus sekolah.
- b. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan berpikir kritis guna melatih kemampuan, memahami dan menganalisis masalah-masalah pendidikan.
- c. Penelitian ini sangat berguna sebagai bahan dokumentasi dan penambah wawasan.

### **2. Bagi Masyarakat**

Sebagai bahan informasi khususnya Kabupaten Pohuwato mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap pentingnya pendidikan serta memperhatikan keadaan ekonomi keluarga anak didik.

### **3. Bagi Orang Tua dan Anak**

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau saran supaya orang tua dapat lebih memperhatikan pergaulan anak dan anak sendiri dapat meningkatkan motivasinya serta dapat menyelesaikan pendidikan anak hingga ke jenjang perguruan tinggi.



#### 4. Bagi lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk melengkapi perpustakaan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo dan sebagai bahan analisis mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga putus sekolah di Provinsi Gorontalo.